

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Rungkut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak. Berdasarkan Keputusan tersebut, KPP Surabaya Rungkut merupakan pecahan dari KPP Surabaya Wonocolo. Pemecahan tersebut menyebabkan juga pemecahan wilayah administrasi Wajib Pajak yang semula dibawah oleh KPP Surabaya Wonocolo juga dibagi dengan KPP Surabaya Rungkut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.158/PJ/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surabaya Rungkut dibentuk pada tanggal 13 Nopember 2008. Saat Mulai Operasi (SMO) Sistem Administrasi Modern dan launchingnya telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2007. Tujuan dari pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan “*Good Governance*” dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 bulan April 2009 menjelaskan bahwa KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. KPP Pratama dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;

- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pelaksanaan intensifikasi;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

PMK tersebut juga memberikan perbedaan maupun batas kewenangan masing – masing antara KPP Besar, KPP Madya dan KPP Pratama. Adapun beberapa perbedaannya terletak pada skala wajib pajak yang dibawah, jenis wajib pajak, jumlah wajib pajak, jenis pajak yang menjadi kewenangan administrasinya, kewenangnya pada PPN, terdapat atau tidaknya fungsi ekstensifikasi, jumlah eselon IV yang berada pada masing – masing kantor tersebut serta cakupan wilayah kerjanya. Rangkuman dari karakteristik jenis KPP Besar, Madya dan Pratama disajikan dalam tabel 7 agar mudah dipahami sebagai berikut :

Tabel 7 Karakteristik Jenis KPP

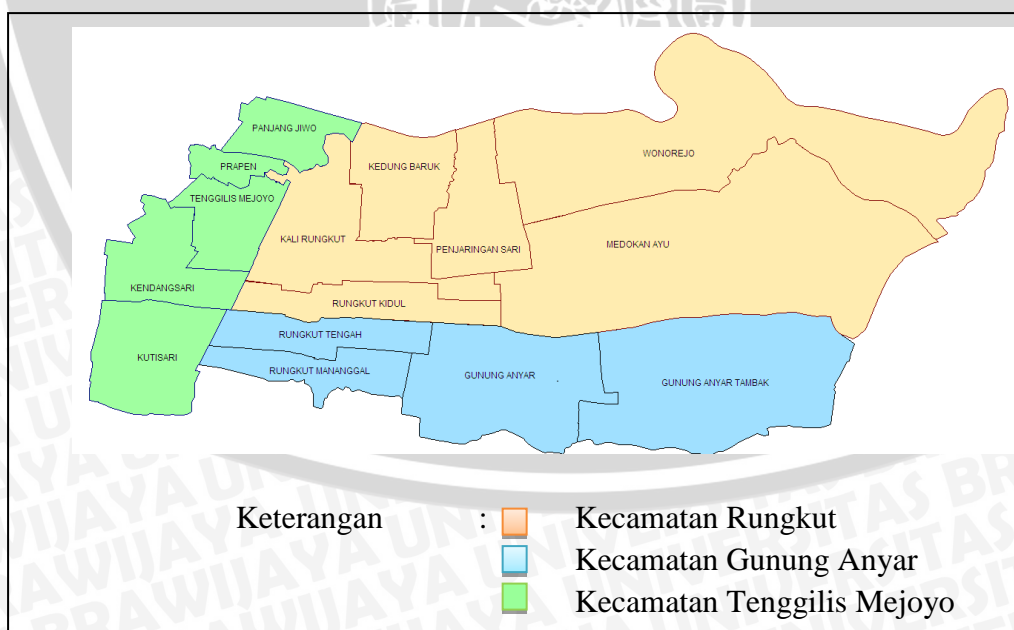
No	Uraian	Kantor Pelayanan Pajak		
		Besar	Madya	Pratama
1	Skala Wajib Pajak	Badan Usaha Milik Negara dan Wajib Pajak Besar Nasional	Wajib Pajak Besar Kantor Wilayah	Wajib Pajak Menengah dan Kecil
2	Jenis Wajib Pajak	Badan	Badan dan ekspatriat	Badan dan Orang Pribadi
3	Jumlah Wajib Pajak	300 – 400	200 – 1000	Ribuan
4	Jenis Pajak	PPh, PPN, dan PTLL	PPh, PPN, dan PTLL	PPh, PPN, dan PTLL, PBB dan BPHTB
5	PPN	Sentralisasi	Sentralisasi	Desentralisasi
6	P2PPH	Desentralisasi	Desentralisasi	Desentralisasi
7	Fungsi Ekstensifikasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
8	Jumlah Eselon IV	9	9	10
9	Wilayah Kerja	Nasional	Regional	Lokal

Sumber : PMK Nomor 62/PMK.01/2009, data diolah (2014)

Adapun wilayah kerja hasil pecahan dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang dibawah oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut terdiri dari tiga kecamatan dan lima belas kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Rungkut, terdiri dari enam kelurahan yaitu:
 - a) Kelurahan Kali Rungkut
 - b) Kelurahan Kedung Baruk
 - c) Kelurahan Medokan Ayu
 - d) Kelurahan Penjaringan Sari

- e) Kelurahan Rungkut Kidul
 - f) Kelurahan Wonorejo
2. Kecamatan Tenggilis Mejoyo, terdiri dari lima kelurahan yaitu:
- a) Kelurahan Kendangsari
 - b) Kelurahan Kutisari
 - c) Kelurahan Panjang Jiwo
 - d) Kelurahan Prapen
 - e) Kelurahan Tenggilis Mejoyo
3. Kecamatan Gunung Anyar, terdiri dari empat kelurahan yaitu:
- a) Kelurahan Gunung Anyar
 - b) Kelurahan Gunung Anyar Tambak
 - c) Kelurahan Rungkut Menanggal
 - d) Kelurahan Rungkut Tengah



Gambar 4 Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut (2014)

2. Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Rungkut

Struktur organisasi KPP Pratama Surabaya Rungkut berada dibawah koordinasi Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I. Status pegawai yang berada dalam lingkungan KPP Pratama Surabaya Rungkut merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seluruhnya berada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun struktur organisasinya yang mengacu pada PMK Nomor 62/PMK.01/2009 Pasal 60 dimana KPP Pratama terdiri dari Sub bagian Umum; Seksi Pengolahan Data dan Informasi; Seksi Pelayanan; Seksi Penagihan; Seksi Pemeriksaan; Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; Seksi Pengawasan dan Konsultasi I – IV; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 5 Susunan Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Rungkut

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut (2014)

Tugas dari masing – masing seksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga;

- b. Seksi Pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG serta laporan kinerja;
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan;
- d. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen – dokumen penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya;
- f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;

- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV, masing – masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembedaan ketentuan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

3. Wajib Pajak Terdaftar

Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut disajikan dalam grafik dibawah ini :



Gambar 6 Grafik Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2008 – 2013

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut (2014)

Grafik di atas menunjukkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Peningkatan pertumbuhan wajib pajak dapat dilihat sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami pertumbuhan dari 46.268 orang pada tahun 2012 menjadi 48.987 orang pada tahun 2013. Sedangkan pada Wajib Pajak Badan mengalami pertumbuhan dari 7.018 badan pada tahun 2012 menjadi 7.658 badan pada akhir tahun 2013. Kenaikan secara kuantitas dapat dilihat jelas pada grafik yang disajikan dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi menempati komposisi terbanyak dalam jumlah Wajib Pajak terdaftar.

B. Penyajian Data

1. Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

KPP selalu menetapkan target penerimaan yang didapatkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak masing-masing untuk mengontrol penerimaan pajak. Hal yang sama terjadi pula pada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Realisasi dari jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2011 sebesar Rp 447.630.764.729 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 445.199.448.732. Target dari jumlah penerimaan pajak pada tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp 550.055.926.561 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 520.545.105.680 dan pada tahun 2013 target dari jumlah penerimaan sebesar Rp 728.670.844.591 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 586.034.568.973. Adapun target dan realisasi penerimaan KPP Pratama Surabaya Rungkut selama tahun 2011 – 2013 dijelaskan pada Tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Secara Keseluruhan di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2011 - 2013

Tahun	Penerimaan	
	Target	Realisasi
2011	Rp 445.199.448.732	Rp 447.630.764.729
2012	Rp 550.055.926.561	Rp 520.545.105.680
2013	Rp 728.670.844.591	Rp 586.034.568.973

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut (2014)

2. Realisasi Penerimaan PPh Non Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

Adapun jumlah realisasi penerimaan PPh Non Migas dan PPN tahun 2011 hingga 2013 terangkum pada tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9 Realisasi Penerimaan PPh Non Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2011 – 2013

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2011	2012	2013
1	PPh Non Migas	Rp 162.925.514.635	Rp 185.777.393.313	Rp 203.328.108.737
2	PPN	Rp 285.397.368.420	Rp 334.460.613.353	Rp 382.347.266.314

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut (2014)

Jumlah realisasi penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2011 hingga tahun 2013 masing – masing sebesar Rp 162.925.514.635, Rp 185.777.393.313 dan Rp 203.328.108.737, sedangkan realisasi penerimaan PPN pada tahun 2011 hingga tahun 2013 masing – masing sebesar Rp 285.397.368.420, Rp 334.460.613.353 dan Rp 382.347.266.314.

3. Target Penerimaan PPh Non Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

Adapun target yang ditetapkan dalam penerimaan PPh Non Migas dan PPN adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Target Penerimaan PPh Non Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2011 – 2013

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2011	2012	2013
1	PPh Non Migas	Rp 194.629.222.153	Rp 200.205.508.590	Rp 260.055.408.483
2	PPN	Rp 250.364.410.063	Rp 350.700.904.169	Rp 468.185.551.943

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut (2014)

Target penerimaan PPh Non Migas selama tahun 2011 hingga 2013 adalah Rp 194.629.222.153, Rp 200.205.508.590 dan Rp 260.055.408.483. Penerimaan PPN selama tahun 2011 hingga 2013 ditargetkan pada Rp 250.364.410.063, Rp 350.700.904.169 dan Rp 468.185.551.943.

C. Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Penerimaan PPh Non Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

a) Analisis Efektivitas Penerimaan PPh Non Migas di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

Tingkat efektivitas penerimaan PPh Non Migas pada KPP Pratama Surabaya Rungkut diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan PPh Non Migas. Setelah diketahui persentase perbandingannya, maka kriteria tingkat efektivitas dapat

ditentukan. Apabila penerimaan PPh Non Migas diketahui telah efektif, maka kinerja pemungutan PPh Non Migas semakin baik. Pada penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas adalah tingkat pencapaian target penerimaan.

Adapun untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan PPh Non Migas, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Setelah persentase efektivitas diperoleh, jumlah tersebut dicocokkan dengan klasifikasi tingkat efektivitas yang ditetapkan oleh Depdagri sesuai dengan Permendagri yang terbagi sebagai berikut :

- a. Kriteria sangat efektif apabila persentase melebihi 100%;
- b. Kriteria efektif apabila persentase berada antara 90% hingga 100%;
- c. Kriteria cukup efektif apabila persentase berada antara 80% hingga 90%;
- d. Kriteria kurang efektif apabila persentase berada antara 60% hingga 80%;
- e. Dan tidak efektif apabila persentase nilai dibawah 60%.

Perhitungan efektivitas penerimaan PPh Non Migas dari tahun 2011 hingga tahun 2013 disajikan sebagai berikut :

1) Tahun 2011

$$\text{PPh Non Migas} = \frac{\text{Rp } 162.925.514.635}{\text{Rp } 194.629.222.153} = 83,71\%$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \frac{\text{Rp } 37.657.275.571}{\text{Rp } 45.056.542.901} = 83,58\%$$

$$\text{PPh Pasal 22} = \frac{\text{Rp } 5.263.884.646}{\text{Rp } 45.056.542.901} = 75,20\%$$

$$\text{PPh Pasal 22 Impor} = \frac{\text{Rp } 17.072.370.969}{\text{Rp } 12.545.196.222} = 136,09\%$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \frac{\text{Rp } 11.179.533.541}{\text{Rp } 15.947.506.605} = 70,10\%$$

$$\text{PPh Pasal } 25/29 \text{ Orang Pribadi} = \frac{\text{Rp } 11.602.034.607}{\text{Rp } 13.025.774.658} = 89,07\%$$

$$\text{PPh Pasal } 25/29 \text{ Badan} = \frac{\text{Rp } 19.616.153.188}{\text{Rp } 13.025.774.658} = 89,07\%$$

$$\text{PPh Pasal 26} = \frac{\text{Rp } 290.426.972}{\text{Rp } 649.387.195} = 44,72\%$$

$$\text{PPh Final} = \frac{\text{Rp } 60.238.199.941}{\text{Rp } 70.570.704.321} = 85,36\%$$

$$\text{PPh Non Migas lainnya} = \frac{\text{Rp } 698.000}{\text{Rp } 2.574.218} = 27,12\%$$

$$\text{Fiskal luar negeri} = \frac{\text{Rp } 4.937.200}{\text{Rp } 5.522.772.435} = 0,09\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efektivitas PPh Non Migas secara umum pada tahun 2011 mencapai 83,71 persen atau berada dalam kategori cukup efektif. Realisasi penerimaan PPh Non Migas berada dibawah target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu pada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 26, PPh Final, PPh Non Migas lainnya dan Fiskal Luar Negeri. Salah satu sub PPh Non Migas yang melampaui target penerimaan sebesar 36,09 persen yaitu pada PPh 22 Impor. Adapun

rangkuman dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya disajikan pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11 Efektivitas Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2011

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Efektivitas
PPh Non Migas	162.925.514.635	194.629.222.153	83,71%
PPh Pasal 21	37.657.275.571	45.056.542.901	83,58%
PPh Pasal 22	5.263.884.646	7.000.095.943	75,20%
PPh Pasal 22 Impor	17.072.370.969	12.545.196.222	136,09%
PPh Pasal 23	11.179.533.541	15.947.506.605	70,10%
PPh Pasal 25/29 OP	11.602.034.607	13.025.774.658	89,07%
PPh Pasal 25/29 Bd	19.616.153.188	24.308.667.654	80,70%
PPh Pasal 26	290.426.972	649.387.195	44,72%
PPh final	60.238.199.941	70.570.704.321	85,36%
PPh Non Migas lainnya	698.000	2.574.218	27,12%
Fiskal Luar Negeri	4.937.200	5.522.772.435	0,09%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 11, tingkat efektivitas PPh Non Migas secara umum pada tahun 2011 mencapai 83,71 persen. Persentase efektivitas tertinggi berasal dari PPh Pasal 22 Impor sebesar 136,09 persen. Adapun rincian persentase efektivitas PPh Non Migas dari PPh Pasal 21 sebesar 83,58 persen, PPh Pasal 22 sebesar 75,20 persen, PPh Pasal 23 sebesar 70,10 persen, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar 89,07 persen, PPh Pasal 25/29 Badan sebesar 80,70 persen, PPh Pasal 26 sebesar 44,72 persen, PPh Final sebesar 85,36 persen, PPh Non Migas lainnya sebesar 27,12 persen dan fiskal luar negeri sebesar 0,09 persen.

2) Tahun 2012

$$\text{PPh Non Migas} = \frac{\text{Rp } 185.777.393.313}{\text{Rp } 200.205.508.590} = 92,79\%$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \frac{\text{Rp } 42.483.732.226}{\text{Rp } 46.273.869.533} = 91,81\%$$

$$\text{PPh Pasal 22} = \frac{\text{Rp } 6.770.610.509}{\text{Rp } 6.468.346.625} = 104,67\%$$

$$\text{PPh Pasal 22 Impor} = \frac{\text{Rp } 18.572.908.690}{\text{Rp } 20.978.805.685} = 88,53\%$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \frac{\text{Rp } 10.030.810.857}{\text{Rp } 13.737.591.705} = 73,02\%$$

$$\text{PPh Pasal } 25/29 \text{ Orang Pribadi} = \frac{\text{Rp } 12.347.158.749}{\text{Rp } 14.256.767.851} = 86,61\%$$

$$\text{PPh Pasal } 25/29 \text{ Badan} = \frac{\text{Rp } 20.062.655.658}{\text{Rp } 24.104.646.435} = 83,23\%$$

$$\text{PPh Pasal 26} = \frac{\text{Rp } 2.286.897.552}{\text{Rp } 356.881.362} = 640,80\%$$

$$\text{PPh Final} = \frac{\text{Rp } 73.218.103.652}{\text{Rp } 74.021.647.768} = 98,91\%$$

$$\text{PPh Non Migas lainnya} = \frac{\text{Rp } 4.089.595}{\text{Rp } 857.714} = 476,80\%$$

$$\text{Fiskal luar negeri} = \frac{\text{Rp } 425.825}{\text{Rp } 6.066.911} = 7,02\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, persentase efektivitas dirangkum dalam tabel 12. Tingkat efektivitas PPh Non Migas secara umum pada tahun 2012 mencapai 92,79 persen atau berada dalam kategori efektif. Realisasi penerimaan PPh Non Migas berada dibawah target penerimaan yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada PPh Pasal 21 sebesar 91,81 persen, Pasal 22 Impor sebesar 88,53 persen, Pasal 23 sebesar 73,02 persen, Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar 86,61 persen, Pasal 25/29 Badan sebesar 83,23 persen, PPh Final sebesar 98,91 persen dan Fiskal Luar Negeri sebesar 7,02 persen. Terdapat 3 (tiga) jenis PPh Non Migas

yang melampaui target penerimaan pada tahun 2012 yakni PPh Pasal 22, PPh Pasal 26 dan PPh Non Migas lainnya dengan tingkat persentase keefektifan masing – masing sebesar 104,67 persen, 640,8 persen dan 476,8 persen.

Tabel 12 Efektivitas Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2012

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Efektivitas
PPh Non Migas	185.777.393.313	200.205.508.590	92,79%
PPh Pasal 21	42.483.732.226	46.273.869.533	91,81%
PPh Pasal 22	6.770.610.509	6.468.346.625	104,67%
PPh Pasal 22 Impor	18.572.908.690	20.978.805.685	88,53%
PPh Pasal 23	10.030.810.857	13.737.591.705	73,02%
PPh Pasal 25/29 OP	12.347.158.749	14.256.767.851	86,61%
PPh Pasal 25/29 Bd	20.062.655.658	24.104.646.435	83,23%
PPh Pasal 26	2.286.897.552	356.881.362	640,80%
PPh final	73.218.103.652	74.021.674.768	98,91%
PPh Non Migas lainnya	4.089.595	857.714	476,80%
Fiskal Luar Negeri	425.825	6.066.911	7,02%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

3) Tahun 2013

$$\text{PPh Non Migas} = \frac{\text{Rp } 203.328.108.737}{\text{Rp } 260.055.408.483} = 78,19\%$$

$$\text{PPh Pasal 21} = \frac{\text{Rp } 47.913.361.846}{\text{Rp } 59.469.691.876} = 80,57\%$$

$$\text{PPh Pasal 22} = \frac{\text{Rp } 7.595.937.899}{\text{Rp } 9.477.654.144} = 80,15\%$$

$$\text{PPh Pasal 22 Impor} = \frac{\text{Rp } 25.990.768.076}{\text{Rp } 25.998.778.807} = 99,97\%$$

$$\text{PPh Pasal 23} = \frac{\text{Rp } 12.992.371.877}{\text{Rp } 14.041.356.531} = 92,53\%$$

$$\text{PPh Pasal }^{25}/_{29} \text{ Orang Pribadi} = \frac{\text{Rp } 12.939.484.105}{\text{Rp } 17.283.832.843} = 74,86\%$$

$$\text{PPh Pasal 25/29 Badan} = \frac{\text{Rp } 23.369.681.758}{\text{Rp } 28.084.160.399} = 83,21\%$$

$$\text{PPh Pasal 26} = \frac{\text{Rp } 379.849.493}{\text{Rp } 3.201.251.059} = 11,87\%$$

$$\text{PPh Final} = \frac{\text{Rp } 72.125.685.294}{\text{Rp } 102.492.362.036} = 70,37\%$$

$$\text{PPh Non Migas lainnya} = \frac{\text{Rp } 25.000}{\text{Rp } 5.724.708} = 0,44\%$$

$$\text{Fiskal luar negeri} = \frac{\text{Rp } 20.943.389}{\text{Rp } 596.079} = 3513,53\%$$

Tabel 13 Efektivitas Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2013

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Efektivitas
PPh Non Migas	203.328.108.737	260.055.408.483	78,19%
PPh Pasal 21	47.913.361.846	59.469.691.876	80,57%
PPh Pasal 22	7.595.937.899	9.477.654.144	80,15%
PPh Pasal 22 Impor	25.990.768.076	25.998.778.807	99,97%
PPh Pasal 23	12.992.371.877	14.041.356.531	92,53%
PPh Pasal 25/29 OP	12.939.484.105	17.283.832.843	74,86%
PPh Pasal 25/29 Bd	23.369.681.758	28.084.160.399	83,21%
PPh Pasal 26	379.849.493	3.201.251.059	11,87%
PPh final	72.125.685.294	102.492.362.036	70,37%
PPh Non Migas lainnya	25.000	5.724.708	0,44%
Fiskal Luar Negeri	20.943.389	596.079	3513,53%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 13, tingkat efektivitas PPh Non Migas secara umum pada tahun 2013 mengalami penurunan hingga mencapai tingkat persentase sebesar 78,19 persen atau berada dalam kategori kurang efektif.

Dari segi jumlah realisasi penerimaan, rincian PPh Non Migas berada dibawah target penerimaan yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada PPh Pasal 21 sebesar 80,57 persen, PPh Pasal 22 sebesar 80,15 persen, PPh

Pasal 22 Impor sebesar 99,97 persen, PPh Pasal 23 sebesar 92,53 persen, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar 74,86 persen, PPh Pasal 25/29 Badan 83,21 persen, PPh Pasal 26 sebesar 11,87 persen, PPh Final sebesar 70,37 persen dan PPh Non Migas lainnya sebesar 0,44 persen. Diantara jumlah realisasi penerimaan, terdapat salah satu rincian PPh Non Migas yang melampaui target penerimaan pada tahun 2013 yaitu fiskal luar negeri dengan tingkat efektivitas sebesar 3.513,53 persen. Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya realisasi penerimaan menjadi sebesar Rp 20.943.389 pada tahun 2013 disertai dengan penurunan target penerimaan menjadi sebesar Rp 596.079.

Tabel 14 Efektivitas Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2011 – 2013

Jenis Pajak	2011	2012	2013
PPh Non Migas	83,71%	92,79%	78,19%
PPh Pasal 21	83,58%	91,81%	80,57%
PPh Pasal 22	75,20%	104,67%	80,15%
PPh Pasal 22 Impor	136,09%	88,53%	99,97%
PPh Pasal 23	70,10%	73,02%	92,53%
PPh Pasal 25/29 OP	89,07%	86,61%	74,86%
PPh Pasal 25/29 Bd	80,70%	83,23%	83,21%
PPh Pasal 26	44,72%	640,80%	11,87%
PPh final	85,36%	98,91%	70,37%
PPh Non Migas lainnya	27,12%	476,80%	0,44%
Fiskal Luar Negeri	0,09%	7,02%	3513,53%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Tabel 14 menunjukkan persentase efektivitas penerimaan PPh Non Migas beserta rinciannya selama tahun 2011 hingga tahun 2013. PPh Non Migas secara umum mengalami kenaikan pada tahun 2011 menuju tahun

2012, namun persentase tersebut mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga mencapai persentase sebesar 78,19 persen. PPh Pasal 21 mencapai persentase efektivitas terbaik pada tahun 2012 dengan tingkat persentase sebesar 91,81 persen. PPh Pasal 22 mencapai persentase efektivitas terbaik pada tahun 2012 dengan tingkat persentase sebesar 104,67 persen. PPh Pasal 22 Impor mencapai persentase efektivitas terbaik pada tahun 2012 dengan tingkat persentase sebesar 136,09 persen. PPh Pasal 23 mengalami pertumbuhan tingkat efektivitas selama tahun 2011 hingga pada tahun 2013 dengan persentase efektivitas tertinggi pada tahun 2013 sebesar 92,53 persen. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mengalami penurunan tingkat efektivitas dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan persentase efektivitas tertinggi pada tahun 2011 sebesar 89,07 persen. PPh Pasal 25/29 Badan memiliki persentase efektivitas tertinggi sebesar 83,23 persen pada tahun 2012. PPh Pasal 26, PPh Final dan PPh Non Migas lainnya memiliki persentase efektivitas tertinggi pada tahun 2012 dengan persentase masing – masing jenis pajak sebesar 640,80 persen, 98,91 persen dan 476,80 persen. Fiskal luar negeri mengalami pertumbuhan pada persentase efektivitas selama tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan persentase tertinggi 3513,53 persen pada tahun 2013.

Berdasarkan persentase tingkat efektivitas yang telah diketahui maka kriteria tingkat efektivitas PPh Non Migas disajikan dalam tabel 15 sebagai berikut :

Tabel 15 Kriteria Efektivitas Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2011-2013

Jenis Pajak	2011	2012	2013
PPh Non Migas	Cukup efektif	Efektif	Kurang efektif
PPh Pasal 21	Cukup efektif	Efektif	Cukup efektif
PPh Pasal 22	Kurang efektif	Sangat efektif	Cukup efektif
PPh Pasal 22 Impor	Sangat efektif	Cukup efektif	Efektif
PPh Pasal 23	Kurang efektif	Kurang efektif	Efektif
PPh Pasal 25/29 OP	Cukup efektif	Cukup efektif	Kurang efektif
PPh Pasal 25/29 Bd	Cukup efektif	Cukup efektif	Cukup efektif
PPh Pasal 26	Tidak efektif	Sangat efektif	Tidak efektif
PPh final	Cukup efektif	Efektif	Kurang efektif
PPh Non Migas lainnya	Tidak efektif	Sangat efektif	Tidak efektif
Fiskal Luar Negeri	Tidak efektif	Tidak efektif	Sangat efektif

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Penerimaan PPh Non Migas secara umum di KPP Pratama Surabaya Rungkut mengalami peningkatan pada tahun 2011 ke tahun 2012 dan dari tahun 2012 menuju tahun 2013 mengalami penurunan. Berdasarkan tabel 15 pada tahun 2011 penerimaan PPh Non Migas berada dalam kategori cukup efektif dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2012 berada pada kriteria efektif dan pada tahun 2013 kriteria efektifitas penerimaan PPh Non Migas menjadi kurang efektif.

Pada tahun 2011, penerimaan PPh Non Migas secara umum berada dalam kategori cukup efektif dengan persentase tingkat efektivitas sebesar 83,71 persen. Apabila diperhatikan lebih rinci, pada sub – sub PPh Non Migas terdapat satu jenis pajak yang berada dalam kategori sangat efektif yaitu PPh Pasal 22 Impor dan empat jenis pajak yang berada dalam kategori cukup efektif yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

dan PPh Pasal 25/29 Badan serta PPh final. Dua jenis pajak berada dalam kategori kurang efektif yaitu PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan tiga jenis pajak tidak efektif, yaitu PPh Pasal 26, PPh Non Migas lainnya dan fiskal luar negeri.

Pada tahun 2012, penerimaan PPh Non Migas secara umum berada dalam kategori efektif dengan persentase tingkat efektivitas sebesar 92,79 persen. Apabila diperhatikan lebih rinci, pada sub – sub PPh Non Migas terdapat tiga jenis pajak yang berada dalam kategori sangat efektif yaitu PPh Pasal 22, PPh pasal 26 dan PPh Non Migas lainnya serta dua jenis pajak yang berada dalam kategori efektif yaitu PPh Pasal 21 dan PPh final. Selain itu terdapat pula tiga jenis pajak yang berada dalam kategori cukup efektif yaitu PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 25/29 bagi Orang Pribadi dan badan serta terdapat satu kategori kurang efektif dan satu kategori tidak efektif yaitu PPh Pasal 23 dan fiskal luar negeri.

Pada tahun 2013, penerimaan PPh Non Migas secara umum mengalami penurunan dari tahun – tahun sebelumnya hingga mencapai tingkat efektivitas yang kurang. Apabila lebih dirinci lagi, terdapat satu jenis pajak yang berada dalam kategori sangat efektif yaitu fiskal luar negeri dan dua jenis pajak yang berada dalam kategori efektif yaitu pada PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 23 serta tiga jenis pajak yang berada dalam kategori cukup efektif yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 25/29 Badan. Selain itu terdapat masing – masing dua jenis pajak

pada kategori kurang efektif dan tidak efektif yaitu PPh 25/29 Orang Pribadi dan PPh final serta PPh Pasal 26 dan PPh Non Migas lainnya.

b) Analisis Efektivitas Penerimaan PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

Adapun perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PPN selama tahun 2011 hingga tahun 2013 disajikan sebagai berikut :

1) Tahun 2011

$$\text{PPN} = \frac{\text{Rp } 285.397.368.420}{\text{Rp } 250.395.793.476} = 113,98\%$$

$$\text{PPN dalam negeri} = \frac{\text{Rp } 248.962.666.898}{\text{Rp } 213.493.791.644} = 116,61\%$$

$$\text{PPN Impor} = \frac{\text{Rp } 36.428.898.022}{\text{Rp } 36.826.327.798} = 98,92\%$$

$$\text{PPN lainnya} = \frac{\text{Rp } 5.803.500}{\text{Rp } 44.290.621} = 13,10\%$$

Tabel 16 Efektivitas Penerimaan PPN Tahun 2011

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Efektivitas
PPN	285.397.368.420	250.395.793.476	113,98%
PPN DN	248.962.666.898	213.493.791.644	116,61%
PPN Impor	36.428.898.022	36.826.327.798	98,92%
PPN lainnya	5.803.500	44.290.621	13,10%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Tingkat efektivitas penerimaan PPN pada tahun 2011 sebesar 113,98 persen atau berada diatas standar batasan minimal tingkat efektivitas sebesar 13,98 persen. Tingkat persentase efektivitas tertinggi

pada rincian perhitungan terdapat pada PPN dalam negeri sebesar 116,61 persen atau sebesar 16,61 persen diatas batas minimal. Adapun tingkat efektivitas PPN Impor dan PPN lainnya masing – masing sebesar 98,92 persen dan 13,10 persen.

2) Tahun 2012

$$\text{PPN} = \frac{\text{Rp } 334.460.613.353}{\text{Rp } 350.700.904.169} = 95,37\%$$

$$\text{PPN dalam negeri} = \frac{\text{Rp } 272.402.351.257}{\text{Rp } 305.929.353.409} = 89,04\%$$

$$\text{PPN Impor} = \frac{\text{Rp } 62.057.216.642}{\text{Rp } 44.764.419.325} = 138,63\%$$

$$\text{PPN lainnya} = \frac{\text{Rp } 5.803.500}{\text{Rp } 44.290.621} = 13,10\%$$

Tabel 17 Efektivitas Penerimaan PPN Tahun 2012

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Efektivitas
PPN	334.460.613.353	350.700.904.169	95,37%
PPN DN	272.402.351.257	305.929.353.409	89,04%
PPN Impor	62.057.216.642	44.764.419.325	138,63%
PPN lainnya	1.045.454	7.131.435	14,66%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Tahun 2012 tingkat efektivitas PPN secara umum sebesar 95,37 persen dengan rincian efektivitas dari PPN dalam negeri sebesar 89,04 persen; PPN Impor sebesar 138,63 persen dan PPN lainnya sebesar 14,66 persen. Berdasarkan data perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan PPN terbesar pada tahun 2012 berasal dari PPN

Impor sedangkan PPN lainnya mempunyai tingkat efektivitas paling kecil sebesar 14,66 persen.

3) Tahun 2013

$$\text{PPN} = \frac{\text{Rp } 382.347.266.314}{\text{Rp } 468.550.869.953} = 81,60\%$$

$$\text{PPN dalam negeri} = \frac{\text{Rp } 302.119.970.362}{\text{Rp } 381.314.989.216} = 79,23\%$$

$$\text{PPN Impor} = \frac{\text{Rp } 80.222.025.134}{\text{Rp } 86.896.099.277} = 92,35\%$$

$$\text{PPN lainnya} = \frac{\text{Rp } 5.270.818}{\text{Rp } 1.463.450} = 360,16\%$$

Tabel 18 Efektivitas Penerimaan PPN Tahun 2013

Jenis Pajak	Realisasi	Target	Efektivitas
PPN	382.347.266.314	468.550.869.953	81,60%
PPN DN	302.119.970.362	381.314.989.216	79,23%
PPN Impor	80.222.025.134	86.869.099.277	92,35%
PPN lainnya	5.270.818	1.463.450	360,16%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Tingkat efektivitas PPN pada tahun 2013 secara umum sebesar 81,60 persen atau mengalami penurunan sebesar 13,77 persen dari tingkat efektivitas PPN secara umum pada tahun 2012 sebesar 95,37 persen. Adapun rincian efektivitas dari PPN dalam negeri sebesar 79,23 persen; PPN Impor sebesar 92,35 persen dan PPN lainnya sebesar 360,16 persen. Berdasarkan data perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan PPN terbesar pada tahun 2013 berasal dari PPN lainnya.

Dari data tersebut pula diketahui bahwa PPN dalam negeri mempunyai tingkat efektivitas paling kecil sebesar 79,23 persen.

Tabel 19 Efektivitas Penerimaan PPN Tahun 2011 - 2013

Jenis Pajak	2011	2012	2013
PPN	113,98%	95,37%	81,60%
PPN DN	116,61%	89,04%	79,23%
PPN Impor	98,92%	138,63%	92,35%
PPN lainnya	13,10%	14,66%	360,16%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum PPN mengalami penurunan persentase efektivitas penerimaan dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dan efektivitas penerimaan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 113,98 persen. PPN dalam negeri mengalami penurunan tingkat efektivitas selama tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2011 sebesar 116,61 persen, sedangkan PPN Impor berada pada tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2012 dengan persentase efektivitas penerimaan sebesar 138,63 persen. PPN lainnya merupakan satu – satunya yang mengalami pertumbuhan tingkat efektivitas penerimaan selama tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan persentase efektivitas penerimaan masing – masing sebesar 13,10 persen, 14,66 persen dan 360,16 persen. Adapun kriteria efektivitas penerimaan PPN sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Depdagri adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Kriteria Efektivitas Penerimaan PPN Tahun 2011 - 2013

Jenis Pajak	2011	2012	2013
PPN	Sangat efektif	Efektif	Cukup efektif
PPN DN	Sangat efektif	Cukup efektif	Kurang efektif
PPN Impor	Efektif	Sangat efektif	Efektif
PPN lainnya	Tidak efektif	Tidak efektif	Sangat efektif

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Berdasarkan kriteria efektivitas penerimaan pada PPN tersebut, dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan PPN mengalami penurunan setiap tahunnya secara teratur yaitu pada tahun 2011 dengan kategori sangat efektif menjadi efektif pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 kategori efektivitasnya menurun menjadi cukup efektif.

Pada tahun 2011 penerimaan PPN secara umum berada dalam kategori sangat efektif. Apabila dirinci lagi penerimaan dari PPN mempunyai sub – sub dengan tingkat efektivitas yang berbeda dengan tingkat efektifitas terbaik pada PPN dalam negeri pada kategori sangat efektif. Adapun PPN Impor berada pada kategori efektif dan PPN lainnya berada pada kategori tidak efektif.

Pada tahun 2012 penerimaan PPN secara umum berada dalam kategori efektif. Apabila dirinci lagi penerimaan dari PPN mempunyai sub – sub dengan tingkat efektivitas yang berbeda dengan tingkat efektifitas terbaik pada PPN Impor pada kategori sangat efektif. Adapun PPN dalam negeri berada pada kategori cukup efektif dan PPN lainnya berada pada kategori tidak efektif.

Pada tahun 2013 penerimaan PPN secara umum berada dalam kategori cukup efektif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PPN mengalami penurunan setiap tahunnya. Apabila dirinci lagi penerimaan dari PPN mempunyai sub – sub dengan tingkat efektivitas yang berbeda. Tingkat efektifitas terbaik pada PPN lainnya pada kategori sangat efektif. Adapun PPN dalam negeri berada pada kategori kurang efektif dan PPN impor berada pada kategori efektif.

2. Analisis Kontribusi Penerimaan PPh Non Migas dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

a) Analisis Kontribusi Penerimaan PPh Non Migas Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

Penerimaan PPh Non Migas merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Adapun untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan PPh Non Migas diperoleh dengan cara membandingkan penerimaan PPh Non Migas dengan total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hasil perbandingan tersebut diperoleh dalam bentuk persentase yang kemudian akan dicocokkan dengan kriteria pengukuran kontribusi penerimaan untuk kemudian disimpulkan mempunyai kontribusi atau tidak.

Kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tahun pajak (n)} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan dari PPh Non Migas}}{\sum \text{Penerimaan Pajak di KPP tahun (n)}} \times 100\%$$

Setelah selesai melakukan penghitungan, maka hasil dari perhitungan yang berupa persentase dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- (a) Kriteria sangat kurang dengan tingkat persentase berada pada rentang 0,00% hingga 10%.
- (b) Kriteria kurang dengan tingkat persentase berada pada rentang 10,10% hingga 20%.
- (c) Kriteria sedang dengan tingkat persentase berada pada rentang 20,10% hingga 30%.
- (d) Kriteria cukup baik dengan tingkat persentase berada pada rentang 30,10% hingga 40%.
- (e) Kriteria baik dengan tingkat persentase berada pada rentang 40,10% hingga 50%.
- (f) Kriteria sangat baik dengan tingkat persentase diatas 50%.

Adapun perhitungan tingkat kontribusi penerimaan PPh Non Migas selama tahun 2011 hingga tahun 2013 sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2011, kontribusi PPh Non Migas} = \frac{\text{Rp } 162.925.514.635}{\text{Rp } 447.630.764.729} = 36,40\%$$

$$\text{Tahun 2012, kontribusi PPh Non Migas} = \frac{\text{Rp } 185.777.393.313}{\text{Rp } 520.545.105.680} = 35,69\%$$

$$\text{Tahun 2013, kontribusi PPh Non Migas} = \frac{\text{Rp } 203.328.108.737}{\text{Rp } 586.034.568.973} = 34,70\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, PPh Non Migas mempunyai kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut sebesar 36,40 persen pada tahun 2011. Tahun 2012 penerimaan PPh Non Migas mengalami penurunan menjadi 35,69 persen dan mencapai 34,70 persen pada tahun 2013. Berdasarkan perhitungan tersebut, kontribusi PPh Non Migas terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dari tahun 2011 hingga tahun 2013 secara umum mengalami penurunan. Berdasarkan realisasi penerimaan, PPh Non Migas secara umum mengalami peningkatan jumlah realisasi penerimaan yang diiringi dengan peningkatan total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Tabel 21 Kontribusi Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2011 - 2013

PPh Non Migas	2011	2012	2013
Realisasi	162.925.514.635	185.777.393.313	203.328.108.737
Total Penerimaan Pajak	447.630.764.729	520.545.105.680	586.034.568.973
Kontribusi	36,40%	35,69%	34,70%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Kontribusi penerimaan PPh Non Migas selama tahun 2011 hingga tahun 2013 secara umum mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat diketahui berdasarkan menurunnya persentase angka kontribusi PPh Non Migas terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut selama tahun 2011 hingga tahun 2013 masing – masing sebesar 36,40 persen, 35,69

persen dan 34,70 persen. Berdasarkan persentase kontribusi tersebut, maka kriteria kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut adalah sebagai berikut :

Tabel 22 Kriteria Kontribusi Penerimaan PPh Non Migas Tahun 2011 - 2013

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2011	36,40 %	Cukup baik
2012	35,69 %	Cukup baik
2013	34,70 %	Cukup baik

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2011 dengan persentase sebesar 36,40 persen termasuk dalam kriteria cukup baik, begitu juga dengan kontribusi penerimaan pada tahun 2012 dan tahun 2013 masing – masing sebesar 35,69 persen dan 34,70 persen dengan kriteria yang sama. Selama tahun 2011 hingga tahun 2013 kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut adalah cukup baik, namun persentase kontribusi selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

b) Analisis Kontribusi Penerimaan PPN Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

Adapun perhitungan kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut tahun 2011 hingga tahun 2013 disajikan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2011, kontribusi PPN} = \frac{\text{Rp } 285.397.368.420}{\text{Rp } 447.630.764.729} = 63,76\%$$

$$\text{Tahun 2012, kontribusi PPN} = \frac{\text{Rp } 334.460.613.353}{\text{Rp } 520.545.105.680} = 64,25\%$$

$$\text{Tahun 2013, kontribusi PPN} = \frac{\text{Rp } 382.347.266.314}{\text{Rp } 586.034.568.973} = 65,24\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, PPN mempunyai kontribusi terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut sebesar 63,76 persen pada tahun 2011. Tahun 2012 penerimaan PPN mengalami peningkatan menjadi 35,69 persen dan mencapai 65,24 persen pada tahun 2013. Berdasarkan perhitungan tersebut, kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dari tahun 2011 hingga tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan. Berdasarkan realisasi penerimaan, PPN secara umum mengalami peningkatan jumlah realisasi penerimaan yang diiringi dengan peningkatan total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Tabel 23 Kontribusi Penerimaan PPN Tahun 2011 – 2013

PPN	2011	2012	2013
Realisasi	285.397.368.420	334.460.613.353	382.347.266.314
Total Penerimaan Pajak	447.630.764.729	520.545.105.680	586.034.568.973
Kontribusi	63,76%	64,25%	65,24%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Kontribusi penerimaan PPN selama tahun 2011 hingga tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat diketahui berdasarkan meningkatnya persentase angka kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut selama tahun 2011 hingga tahun 2013 masing – masing sebesar 63,76 persen, 64,25 persen dan 65,24 persen. Adapun kriteria kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Kriteria Kontribusi Penerimaan PPN Tahun 2011 -2013

Tahun	Kontribusi	Kriteria
2011	63,76 %	Sangat baik
2012	64,25 %	Sangat baik
2013	65,24 %	Sangat baik

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 24, kontribusi penerimaan PPN mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dibuktikan berdasarkan persentase kontribusi penerimaan PPN terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut selama tahun 2011 hingga tahun 2013 masing – masing

sebesar 63,76 persen, 64,25 persen dan 65,24 persen dengan kategori cukup baik.

3. Analisis Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut Pada Tahun 2011 – 2013

Jenis pajak yang berada di bawah kewenangan KPP Pratama Surabaya Rungkut antara lain meliputi PPh Non Migas, PPh Migas, PPN dan PPnBM serta bunga maupun denda penagihan pajak. Adapun untuk mengetahui secara detail dari realisasi penerimaan pajak akan disajikan dalam tabel 25 sebagai berikut :

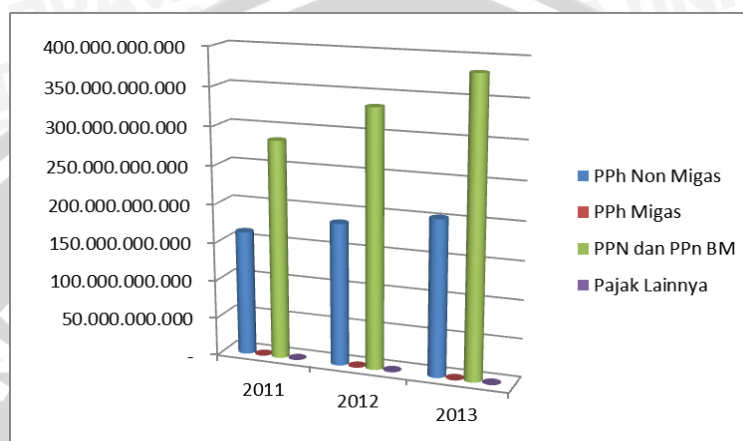
Tabel 25 Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2011 – 2013

No	Jenis Pajak	2011	2012	Growth (%)	2013	Growth (%)
1	PPh Non Migas	Rp 162.925.514.635	Rp 185.777.393.313	14,03%	Rp 203.328.108.737	9,45%
	PPh Pasal 21	Rp 37.657.275.571	Rp 42.483.732.226	12,82%	Rp 47.913.361.846	12,78%
	PPh Pasal 22	Rp 5.263.884.646	Rp 6.770.610.509	28,62%	Rp 7.595.937.899	12,19%
	PPh Pasal 22 Impor	Rp 17.072.370.969	Rp 18.572.908.690	8,79%	Rp 25.990.768.076	39,94%
	PPh Pasal 23	Rp 11.179.533.541	Rp 10.030.810.857	-10,28%	Rp 12.992.371.877	29,52%
	PPh Pasal 25/29 OP	Rp 11.602.034.607	Rp 12.347.158.749	6,42%	Rp 12.939.484.105	4,80%
	PPh Pasal 25/29 Bd	Rp 19.616.153.188	Rp 20.062.655.658	2,28%	Rp 23.369.681.758	16,48%
	PPh Pasal 26	Rp 290.426.972	Rp 2.286.897.552	687,43%	Rp 379.849.493	-83,39%
	PPh final	Rp 60.238.199.941	Rp 73.218.103.652	21,55%	Rp 72.125.685.294	-1,49%
	PPh Non Migas lainnya	Rp 698.000	Rp 4.089.595	485,90%	Rp 25.000	-99,39%
	Fiskal Luar Negeri	Rp 4.937.200	Rp 425.825	-91,38%	Rp 20.943.389	4818,31%
2	PPh Migas	Rp 218.293	Rp 1.806.326	727,48%	Rp 5.170.803	186,26%
	PPh Gas Alam	Rp 92.293	Rp 1.590.876	1623,72%	Rp 5.145.533	223,44%
	PPh Migas Lainnya	Rp 126.000	Rp 215.450	70,99%	Rp 25.270	-88,27%
3	PPN dan PPn BM	Rp 284.705.031.801	Rp 334.721.587.843	17,57%	Rp 382.667.230.214	14,32%
	PPN DN	Rp 248.962.666.898	Rp 272.402.351.257	9,41%	Rp 302.119.970.362	10,91%
	PPN Impor	Rp 36.428.898.022	Rp 62.057.216.642	70,35%	Rp 80.222.025.134	29,27%
	PPN lainnya	Rp 5.803.500	Rp 1.045.454	-81,99%	Rp 5.270.818	404,17%
	PPn BM DN	Rp 25.328.747	Rp 7.825.490	-69,10%	Rp 46.431.900	493,34%
	PPn BM Impor	Rp (717.665.366)	Rp 253.149.000	-135,27%	Rp 273.532.000	8,05%
4	Pajak Lainnya	Rp -	Rp 44.318.198	-	Rp 34.059.219	-23,15%
	Bunga/denda Penagihan PPh	Rp -	Rp 44.318.198	-	Rp 878.699	-98,02%
	Bunga/denda Penagihan PPN	Rp -	Rp -	-	Rp 33.180.520	-
	Total	Rp 447.630.764.729	Rp 520.545.105.680	16,29%	Rp 586.034.568.973	12,58%

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 25, penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir dari PPh Non Migas mengalami peningkatan dari segi realisasi penerimaan. Selama tahun 2011 hingga 2013 realisasi penerimaan PPh Non Migas masing – masing sebesar Rp 162.925.514.635, Rp 185.777.393.313 dan Rp 203.328.108.737 dengan persentase pertumbuhan pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 dan tahun 2013 dibanding tahun 2012 masing - masing sebesar 14,03 persen dan 9,45 persen. Jumlah realisasi penerimaan PPh Migas selama tahun 2011 hingga 2013 berturut – turut sebesar Rp 218.293, Rp 1.806.326 dan Rp 5.170.803 dengan persentase pertumbuhan pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 sebesar 727,48 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 menjadi sebesar 186,26 persen. Selain jumlah penerimaan PPh Migas dan Non Migas, jumlah realisasi penerimaan dari PPN dan PPnBM selama tahun 2011 hingga tahun 2013 masing – masing sebesar Rp 284.705.031.801, Rp 334.721.587.843 dan Rp 382.667.230.214 dengan persentase pertumbuhan pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 sebesar 17,57 dan mengalami penurunan pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 menjadi sebesar 14,32 persen. Jumlah penerimaan yang berasal dari pajak lainnya yakni bunga/denda penagihan pada PPh maupun PPN dengan jumlah realisasi penerimaan pada tahun 2012 sebesar Rp 44.318.198 mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar Rp 34.059.219 dengan persentase pertumbuhan pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 sebesar minus 23,15 persen.

Adapun untuk mempermudah dalam memahami pertumbuhan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Rungkut, maka pertumbuhan penerimaan pajak tersebut terangkum dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 7 Grafik Pertumbuhan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2011 – 2013

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2011 hingga tahun 2013, pertumbuhan penerimaan tertinggi berasal dari PPN dan PPnBM serta PPh Non Migas. PPh Migas dari segi realisasi mengalami pertumbuhan sedangkan pada Pajak lainnya mengalami penurunan realisasi penerimaan.

Hubungan antara efektivitas dan kontribusi penerimaan PPh Non Migas dan PPN terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut disajikan dalam tabel 26 sebagai berikut :

Tabel 26 Perbandingan Presentase Tingkat Efektivitas dan Kontribusi PPh Non Migas dan PPN di KPP Pratama Surabaya Rungkut Tahun 2011 - 2013

Uraian		Persentase		
		2011	2012	2013
Efektivitas	PPh Non Migas	83,71%	92,79%	78,19%
	PPN	113,98%	95,37%	81,60%
Kontribusi	PPh Non Migas	36,40%	35,69%	34,70%
	PPN	63,76%	64,25%	65,24%
Total Penerimaan		Rp 447.630.764.729	Rp 520.545.105.680	Rp 586.034.568.973

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut, data diolah (2014)

Dari hasil analisis data yang dilakukan, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas PPh Non Migas di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2011 sebesar 83,71 persen atau cukup efektif. Persentase tingkat efektivitas tersebut menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2011 cukup efektif yaitu sebesar 83,71 persen dari target penerimaan PPh Non Migas tahun 2011 yang telah ditetapkan. Kontribusi PPh Non Migas pada tahun 2011 terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut termasuk ke dalam kategori cukup baik dengan persentase sebesar 36,40 persen. Jumlah kontribusi dari PPh Non Migas pada tahun 2011 sebesar Rp 162.925.514.635 total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Keberhasilan penerimaan PPN pada tahun yang sama yaitu tahun 2011 sangat efektif dengan jumlah persentase efektivitas penerimaan PPN pada tahun 2011 mencapai 113,98 persen melampaui dari target penerimaan PPN yang telah ditetapkan. Kontribusi dari PPN sangat baik dengan persentase sebesar 63,76 persen atau PPN mempunyai kontribusi

sebesar Rp 285.397.368.420 dari total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2011 sebesar Rp 447.630.764.729.

Tingkat efektivitas PPh Non Migas pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 92,79 persen. Presentase tingkat efektivitas tersebut menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2012 efektif dengan persentase sebesar 92,79 persen dari target penerimaan PPh Non Migas yang telah ditetapkan. Kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tahun 2012 cukup baik, yaitu sebesar 35,69 persen dari total penerimaan pajak atau sebesar Rp 185.777.393.313. Tingkat keberhasilan penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2012 efektif dengan persentase mencapai 95,37 persen dari target penerimaan PPh Non Migas yang telah ditetapkan. Jumlah kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut sangat baik, tetapi mengalami peningkatan dalam persentase kontribusi menjadi sebesar 64,25 persen atau sebesar Rp 334.460.613.353 dari total penerimaan pajak.

Adapun pada tahun 2013, tingkat efektivitas PPh Non Migas mengalami penurunan menjadi sebesar 78,19 persen. Persentase tingkat efektivitas tersebut menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2013 kurang efektif dengan persentase efektivitas sebesar 78,19 persen dari target penerimaan PPh Non Migas yang telah ditetapkan. Kontribusi penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2013 cukup baik, tapi mengalami penurunan persentase menjadi sebesar 34,70 persen atau

sebesar Rp 203.328.108.737 dari total penerimaan. Persentase tingkat efektivitas penerimaan PPN pada tahun 2013 cukup efektif yaitu sebesar 81,60 persen dari target penerimaan PPN yang telah ditetapkan. Kontribusi penerimaan PPN pada tahun 2013 sangat baik dan mengalami peningkatan persentase menjadi sebesar 65,24 persen atau sebesar Rp 382.347.266.314 dari total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Berdasarkan perbandingan efektivitas dan kontribusi penerimaan PPh Non Migas dan PPN pada tahun 2011 hingga tahun 2013 dapat diketahui bahwa efektivitas PPh Non Migas selama tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami pergerakan dengan tingkat efektivitas terbaik pada tahun 2012 sebesar 92,79 persen, sedangkan pada PPN mengalami penurunan tingkat efektivitas penerimaan dengan tingkat efektivitas terbaik pada tahun 2011 sebesar 113,98 persen yang melampaui target penerimaan. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut terus mengalami penurunan dengan tingkat kontribusi terbesar pada tahun 2011 sebesar 36,40 persen. Hal yang berbeda terjadi pada kontribusi dari PPN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan tingkat kontribusi terbaik pada tahun 2013 sebesar 65,24 persen.

Adapun tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mempunyai peranan dalam kontribusi PPh Non Migas dan PPN yang terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tersebut terangkum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 27 Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 - 2013

Uraian		2011	2012	2013	
Produk Domestik Bruto (PDB)	Atas Dasar Harga Berlaku (triliun rupiah)	PDB	7.419,2	8.229,4	9.084,0
		PDB tanpa Migas	6.795,9	7.588,3	8.416,0
Inflasi (persen)	Atas Dasar Harga Konstan (triliun rupiah)	PDB	2.464,6	2.618,9	2.770,3
		PDB tanpa Migas	2.322,7	2.481,8	2.637,0
			3,79 %	4,30%	8,38%

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah (2014)

Berdasarkan tabel 27, dapat diketahui bahwa peningkatan PDB yang terjadi tidak lepas dari peningkatan inflasi. Sehubungan dengan kontribusi yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini, meningkatnya kontribusi penerimaan PPh Non Migas terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut selama tahun 2011 - 2013 terjadi karena peningkatan PDB tanpa Migas yang diiringi dengan meningkatnya inflasi. Atas tingginya PDB yang terjadi baik PDB secara keseluruhan maupun PDB tanpa Migas, maka tingkat konsumsi yang terjadi pada masyarakat juga mengalami peningkatan sehingga atas kontribusi yang berasal dari PPN juga mengalami peningkatan.